

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengacu pada jenis kategori pemain kebijakan nonformal yaitu kelompok kepentingan, partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Sleman bisa dibedakan dalam partisipasi LSM, komunitas anak, dan dunia usaha. Partisipasi LSM bisa ditemukan mulai keberadaan mereka dalam Gugus Tugas KLA Sleman. Untuk tahapan pengembangan KLA Sleman, LSM terlibat mulai dari persiapan dan perencanaan (LPA), pelaksanaan (LPA, LIMORA) dan evaluasi (LSPPA). Partisipasi komunitas anak diwakili oleh keterlibatan Forum Anak Sleman (FORANS) dalam Gugus Tugas KLA Sleman yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Keberadaan FORANS yang sampai memiliki forum anak di tingkat kecamatan menjadi keunggulan tersendiri bagi Sleman dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang sedang menuju KLA. Partisipasi dunia usaha diwakili oleh IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) dalam Gugus Tugas KLA Sleman, meskipun lebih banyak bersifat formalitas dan keterwakilan individu bukan institusi.
2. Berkaitan dengan jenis partisipasi masyarakat yang bisa dibedakan dalam partisipasi otonom dan partisipasi dimobilisasi, partisipasi masyarakat dalam

kebijakan pengembangan KLA di Sleman ada yang bersifat otonom seperti yang dilakukan oleh LSM Limora yang awalnya terlibat dalam program Dinas Sosial DIY yang kebetulan berlokasi di Kabupaten Sleman dan kemudian bisa dikaitkan dengan kebijakan KLA di Sleman. Selain partisipasi otonom, ada juga partisipasi yang dimobilisasi seperti peran serta FORANS yang awal mulanya adalah komunitas anak independen namun lambat laun menjadi bagian dari BKB-PMPP Kabupaten Sleman.

3. Mengacu pada gagasan Oakley (1991: 9) terkait pemahaman partisipasi, ada tiga dimensi pengertian pokok, yaitu Partisipasi sebagai kontribusi; Partisipasi sebagai organisasi; dan Partisipasi sebagai pemberdayaan. Partisipasi masyarakat dalam hal ini partisipasi LSM, Forum Anak Sleman, dan dunia usaha selama ini baru pada pemahaman partisipasi sebagai kontribusi yang mana kontribusi masyarakat dijabarkan menjadi indikator-indikator : (1) Kontribusi Pemikiran, seperti gagasan dari LPA atau masukan suara anak melalui FORANS pada Gugus Tugas KLA Sleman (2) Kontribusi Dana, seperti kontribusi dari dunia usaha meskipun masih sporadis dan belum terlembaga dengan baik (3) Kontribusi Tenaga, seperti keterlibatan LPA, Lembaga LIMORA dan FORANS dalam melakukan kegiatan yang mencerminkan pemenuhan hak anak dan pencapaian indikator KLA dan (4) Kontribusi Sarana. Sedangkan dimensi berikutnya, dimensi pengorganisasian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat masih perlu terus dikembangkan.

B. Kontribusi

Penelitian ini memberikan kontribusi kepada pengembangan kajian kebijakan kesejahteraan sosial khususnya bagaimana partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan sosial bisa dimunculkan, dikelola, dan dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Cooke, B & Kothari, Uma, *Participation : The New Tyranny*, London: Zed Books, 2001
- Dwiningrum, Siti Irene A (2011) *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teoretis dan Empirik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ife, Jim, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, terj. S. Manullang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Handoyo, B. Hestu Cipto (2008) *Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya
- Ismail, Fauzi et all (2005) *Libatkan Rakyat dalam Pengambilan Kebijakan*, Yogyakarta: Forum LSM
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muslimin B. Putra, *Menimbang Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi*, dalam http://www.goodgovernance-bappenas.co.id/artikel_60.htm.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

No. 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

No. 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi KLA

Pusdatin Kesos, *Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta:

Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen
Sosial RI, 2009.

Rahmat A. Prakoso, *Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan di Masa*

Transisi, dalam [http://www.ipcos.or.id/index2.php?option=com
_content&do_pdf=1&id=42](http://www.ipcos.or.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=42).

Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Sugandy, Aca & Hakim, Rustam, *Prinsip Dasar Kebijakan: Pembangunan
Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta,
2008.

Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji
Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta, 2006.

Sumarto, Hetifah Sj (2004) *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20
Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia

Tavip Haryadi, *Tantangan Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pencapaian MDGs*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Dari MDGs ke SDGs” oleh Pusat Studi Kependudukan & Kebijakan UGM, BKKBN, dan Koalisi Kependudukan, di Yogyakarta, tanggal 18 Juni 2013

Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.